



BUKU PANDUAN



E-MONEV PBJ BPKP

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
MONITORING DAN EVALUASI
PENGADAAN BARANG/JASA

MAPPING PERATURAN

-

UKPBJ

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
DAFTAR ISI	2
TENTANG APLIKASI	3
MAPPING PERATURAN	
1. Akses e-Monev	5
2. Kelola Mapping Peraturan	6
3. Input Kategori Mapping Peraturan	7
4. Input Sub Kategori Mapping Peraturan	8
5. Edit Kategori Mapping Peraturan	9
6. Hapus Kategori Mapping Peraturan	10
7. Input Mapping Peraturan	11
PENUTUP	12

TENTANG APLIKASI

Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa atau **e-Monev PBJ** merupakan sistem informasi yang memberi dukungan informasi strategis berupa dashboard yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pengadaan maupun unit pengadaan barang/jasa.

e-Monev PBJ sebagai media digitalisasi proses pengadaan di lingkungan BPKP dengan menu Persiapan Pengadaan. Menu persiapan pengadaan menjadi sarana bagi PPK dan Pokja Pemilihan dalam melaksanakan tahapan persiapan yang terdokumentasi secara digital.

Proses integrasi data pengadaan barang/jasa dilakukan melalui **e-Monev PBJ** dari berbagai aplikasi PBJ guna memudahkan proses monitoring dan pelaporan secara berkala. Tidak hanya itu, **e-Monev PBJ** juga menyajikan berbagai media pembelajaran sebagai sarana pembinaan pelaku pengadaan di lingkungan BPKP.

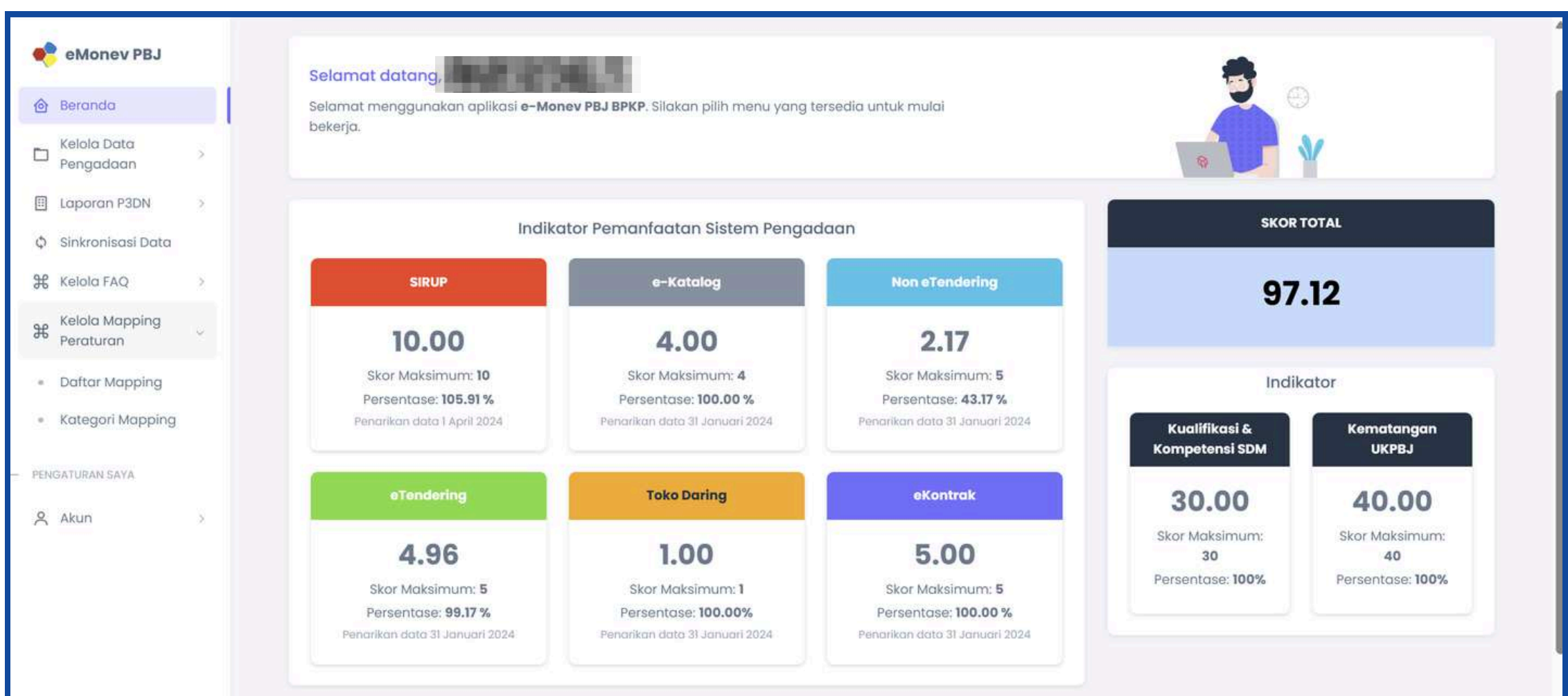
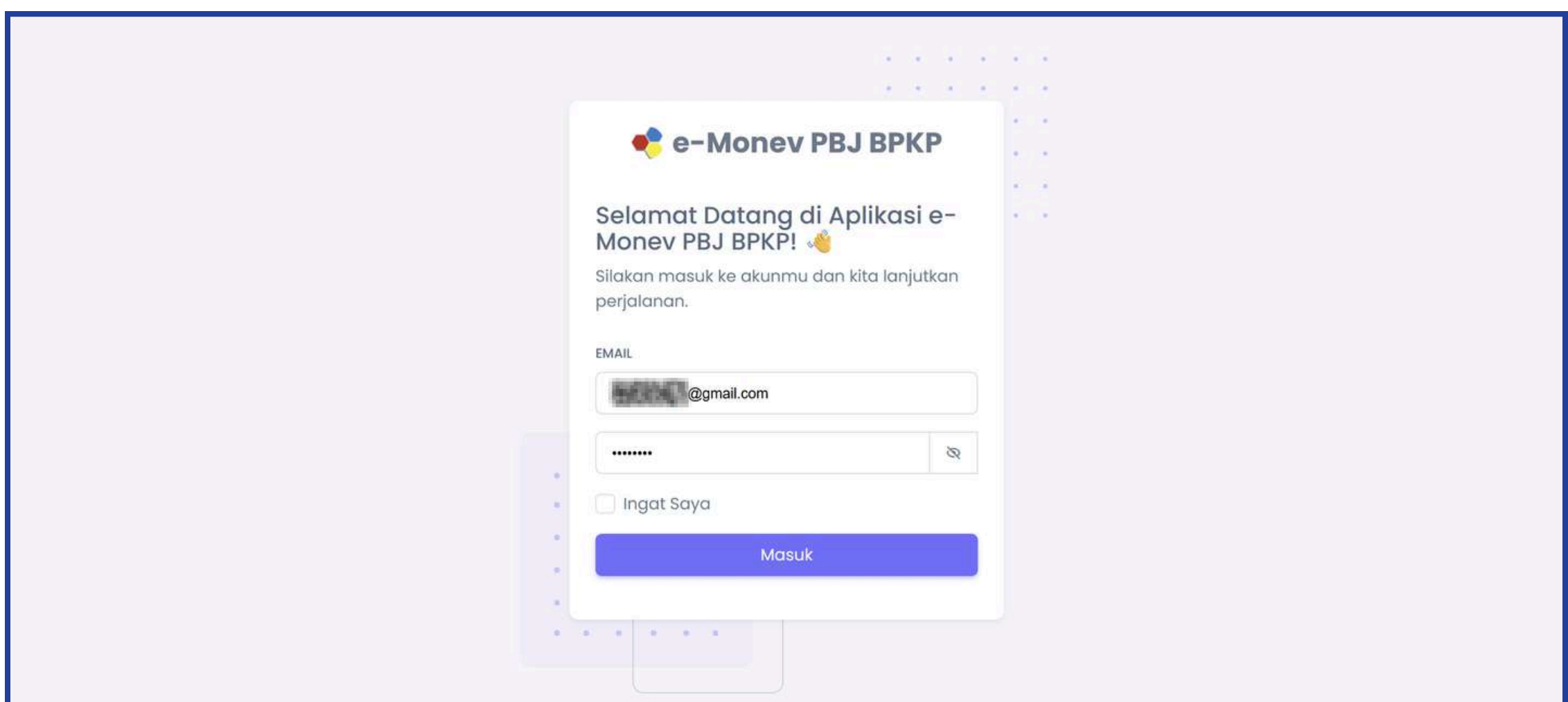


MAPPING PERATURAN - UKPBJ

UKPBJ - MAPPING PERATURAN

Akses e-Monev

Akses aplikasi **e-Monev PBJ** melalui tautan <https://lpsebpbkp.com/> kemudian akan muncul halaman utama lalu klik "Login". Setelah muncul halaman login kemudian masukkan email dan password lalu klik "Masuk" maka akan muncul dashboard yang menampilkan nilai ITKP BPKP.

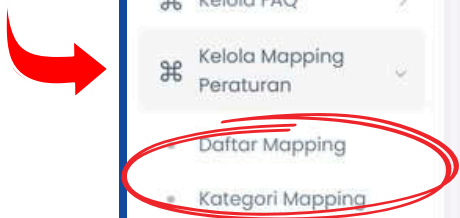


UKPBJ - MAPPING PERATURAN

Kelola Mapping Peraturan

Klik menu Kelola Mapping Peraturan maka akan muncul sub menu Daftar Mapping dan Kategori Mapping.

Menu "Kelola Mapping Peraturan"



Selamat datang, Aulia Farah Dhitasari

Selamat menggunakan aplikasi e-Monev PBJ BPKP. Silakan pilih menu yang tersedia untuk mulai bekerja.

Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan

SIRUP Skor Maksimum: 10 Persentase: 105.91 % Penarikan data 1 April 2024	e-Katalog Skor Maksimum: 4 Persentase: 100.00 % Penarikan data 31 Januari 2024	Non eTendering Skor Maksimum: 5 Persentase: 43.17 % Penarikan data 31 Januari 2024
eTendering Skor Maksimum: 5 Persentase: 99.17 % Penarikan data 31 Januari 2024	Toko Daring Skor Maksimum: 1 Persentase: 100.00 % Penarikan data 31 Januari 2024	eKontrak Skor Maksimum: 5 Persentase: 100.00 % Penarikan data 31 Januari 2024

SKOR TOTAL
97.12

Indikator

Kualifikasi & Kompetensi SDM Skor Maksimum: 30 Persentase: 100%	Kematangan UKPBJ Skor Maksimum: 40 Persentase: 100%
--	--

Tampilan Halaman Daftar Mapping



Data Mapping

Tampilkan 10 data

NO	KATEGORI	SUB KATEGORI	JUDUL MAPPING	STATUS	AKSI
1	Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	AKTIF	
2	Pelaku Pengadaan	Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA dan KPA)	Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA dan KPA)	AKTIF	
3	Pelaku Pengadaan	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	AKTIF	
4	Metode Pengadaan	Tender	Mapping Metode Pengadaan	AKTIF	
5	Pelaku Pengadaan	Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja)	Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja)	AKTIF	

Menampilkan 1 sampai 5 dari 5 data

Data Kategori Mapping

Tampilkan 10 data

NO	NAMA KATEGORI	DETAIL KATEGORI	STATUS	AKSI
1	Pelaku Pengadaan	Menu Mapping Peraturan untuk para pelaku pengadaan	AKTIF	
2	Metode Pengadaan	Memuat peraturan terkait metode pengadaan barang/jasa.	AKTIF	
3	Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Memuat peraturan terkait Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	AKTIF	

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 data

Tampilan Halaman Kategori Mapping

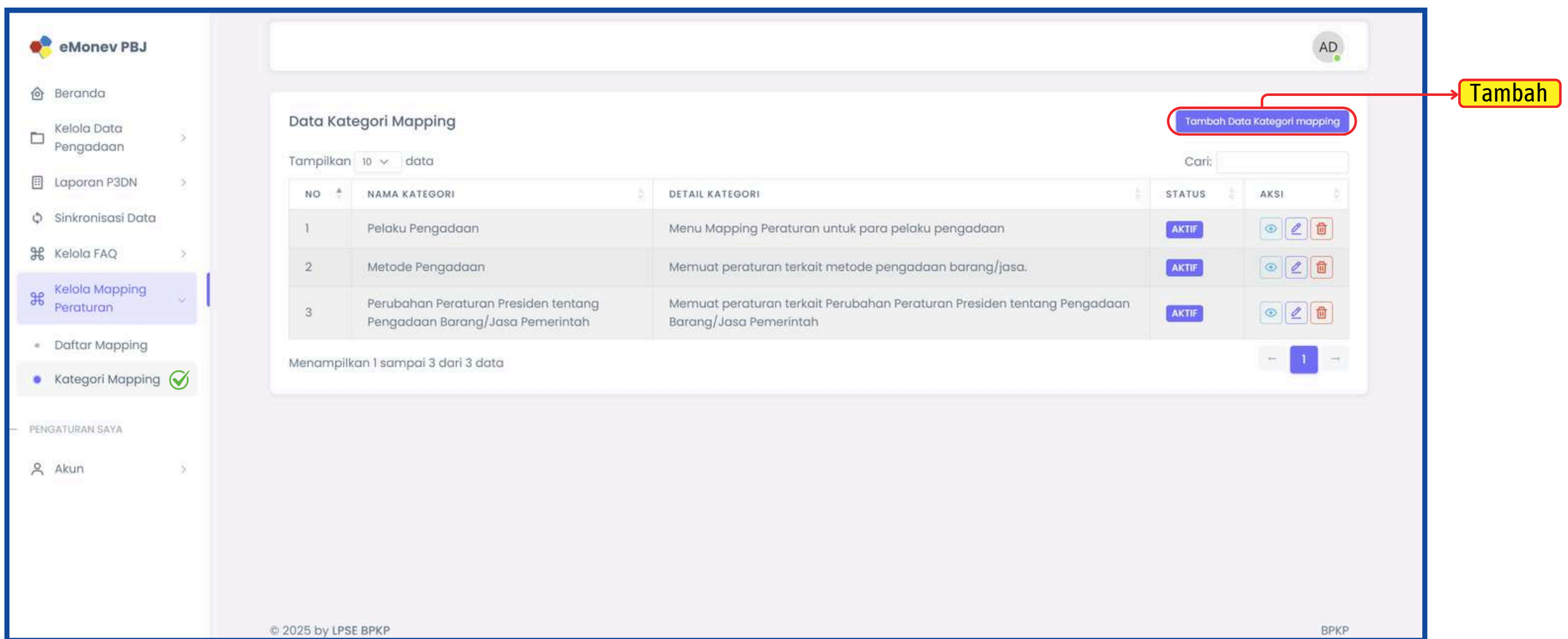


UKPBJ - MAPPING PERATURAN

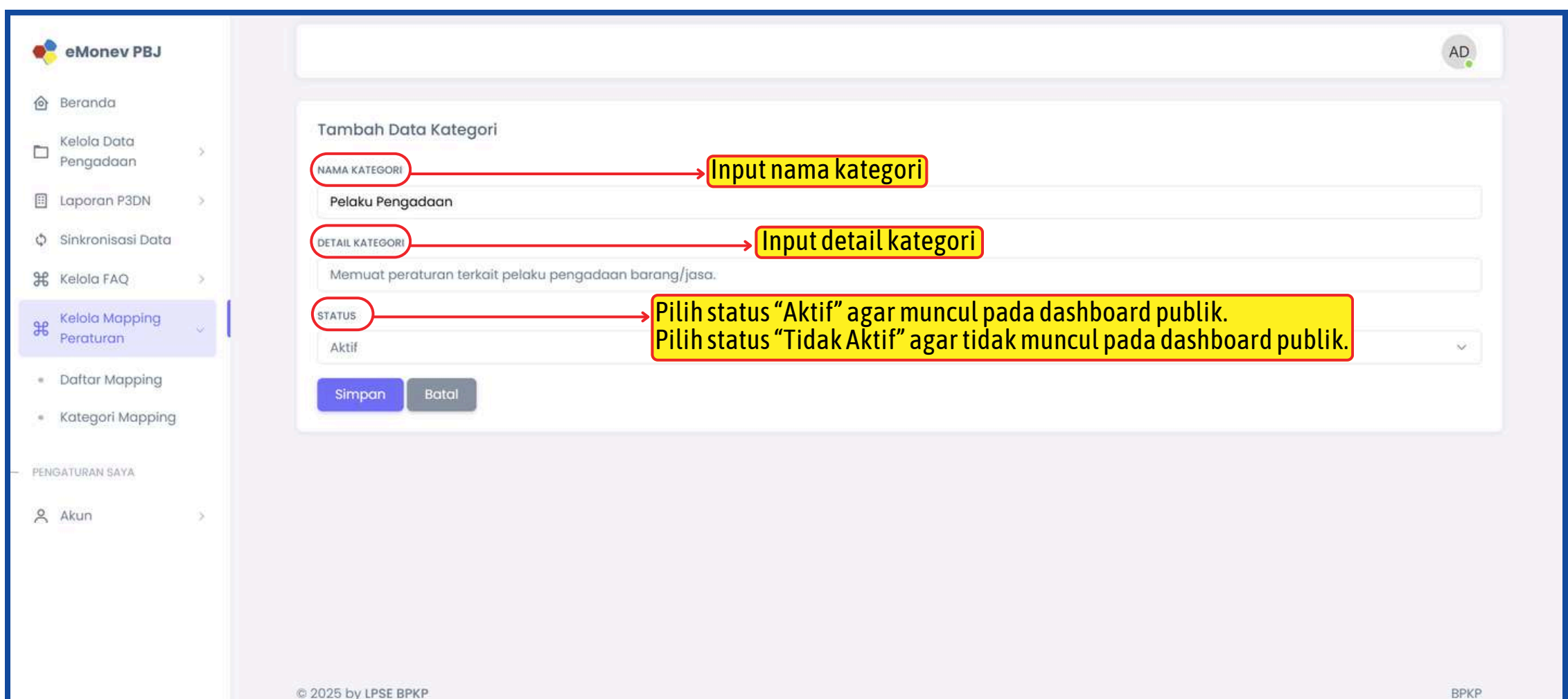
Input Kategori Mapping Peraturan

Pada sub menu Kategori Mapping, Admin dapat menambahkan kategori baru dengan klik “Tambah Data Kategori Mapping” lalu akan muncul halaman Tambah Kategori Mapping. Isi detail kategori Mapping kemudian klik “Simpan”.

Sub Menu
“Kategori
Mapping”



© 2025 by LPSE BPKP



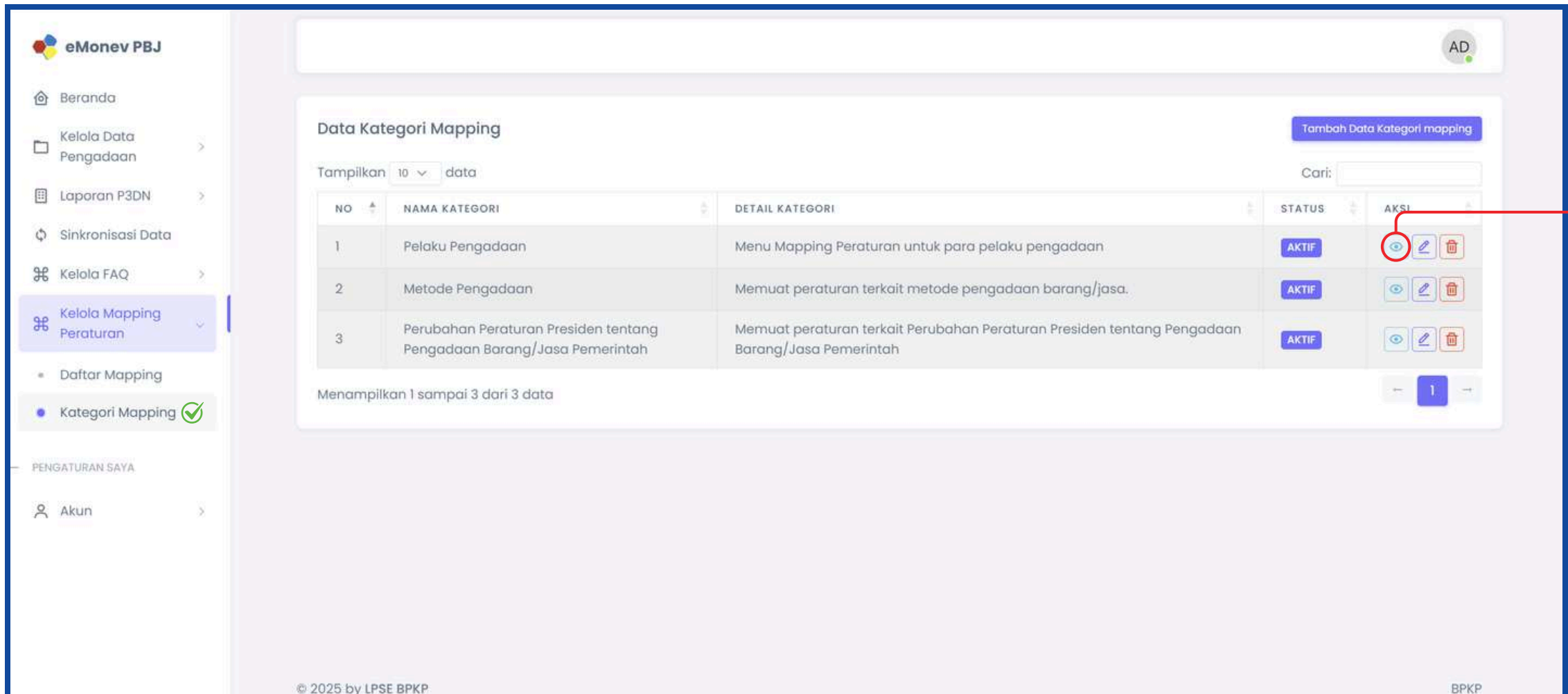
© 2025 by LPSE BPKP

UKPBJ - MAPPING PERATURAN

Input Sub Kategori Mapping Peraturan

Pada sub menu Kategori Mapping, Admin dapat menambahkan sub kategori baru pada kategori Mapping dengan klik fitur “Detail” lalu akan muncul halaman Detail Data Kategori Mapping kemudian klik “Tambah” pada Data Sub Kategori. Isi detail sub kategori kemudian klik “Simpan”.

Sub Menu
“Kategori
Mapping”



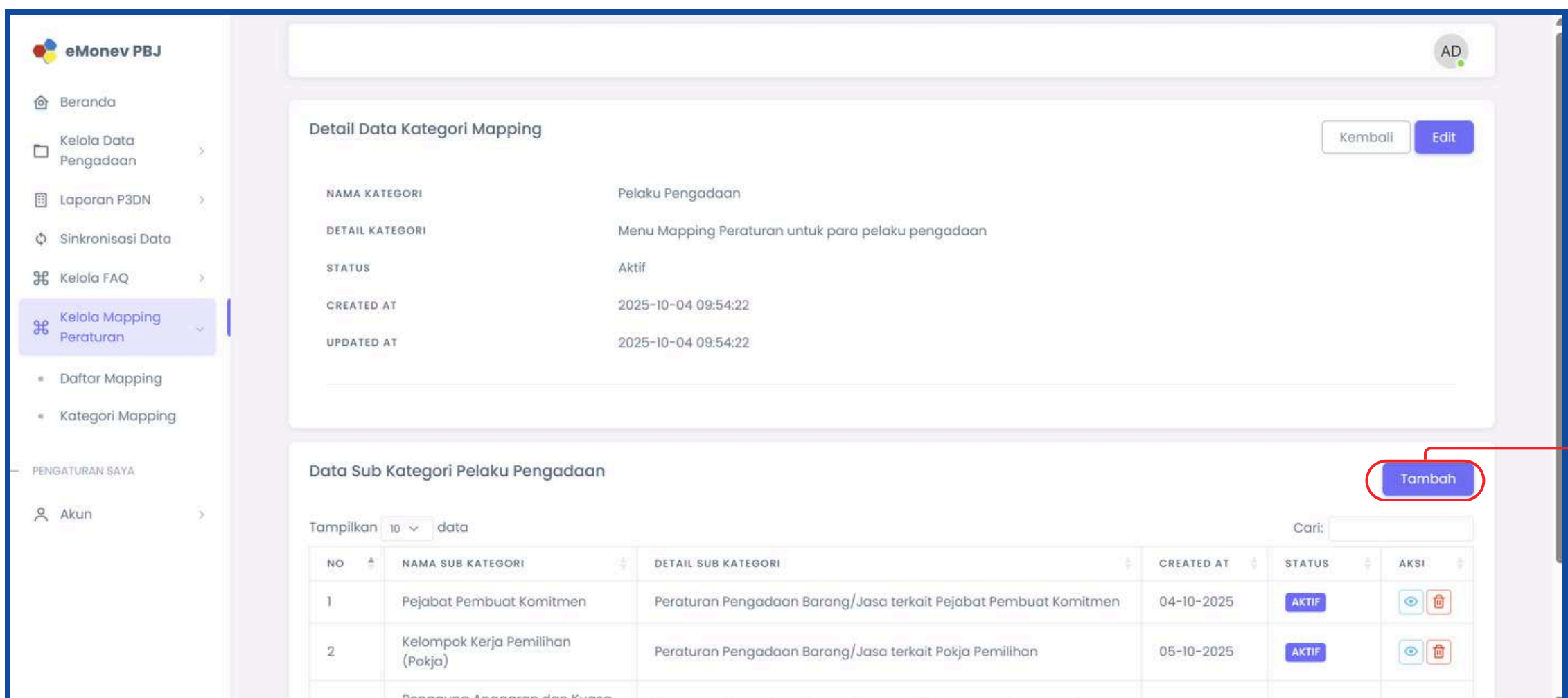
Data Kategori Mapping

Tampilkan 10 data

NO	NAMA KATEGORI	DETAIL KATEGORI	STATUS	AKSI
1	Pelaku Pengadaan	Menu Mapping Peraturan untuk para pelaku pengadaan	AKTIF	
2	Metode Pengadaan	Memuat peraturan terkait metode pengadaan barang/jasa.	AKTIF	
3	Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Memuat peraturan terkait Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	AKTIF	

Menampilkan 1 sampai 3 dari 3 data

Detail



Detail Data Kategori Mapping

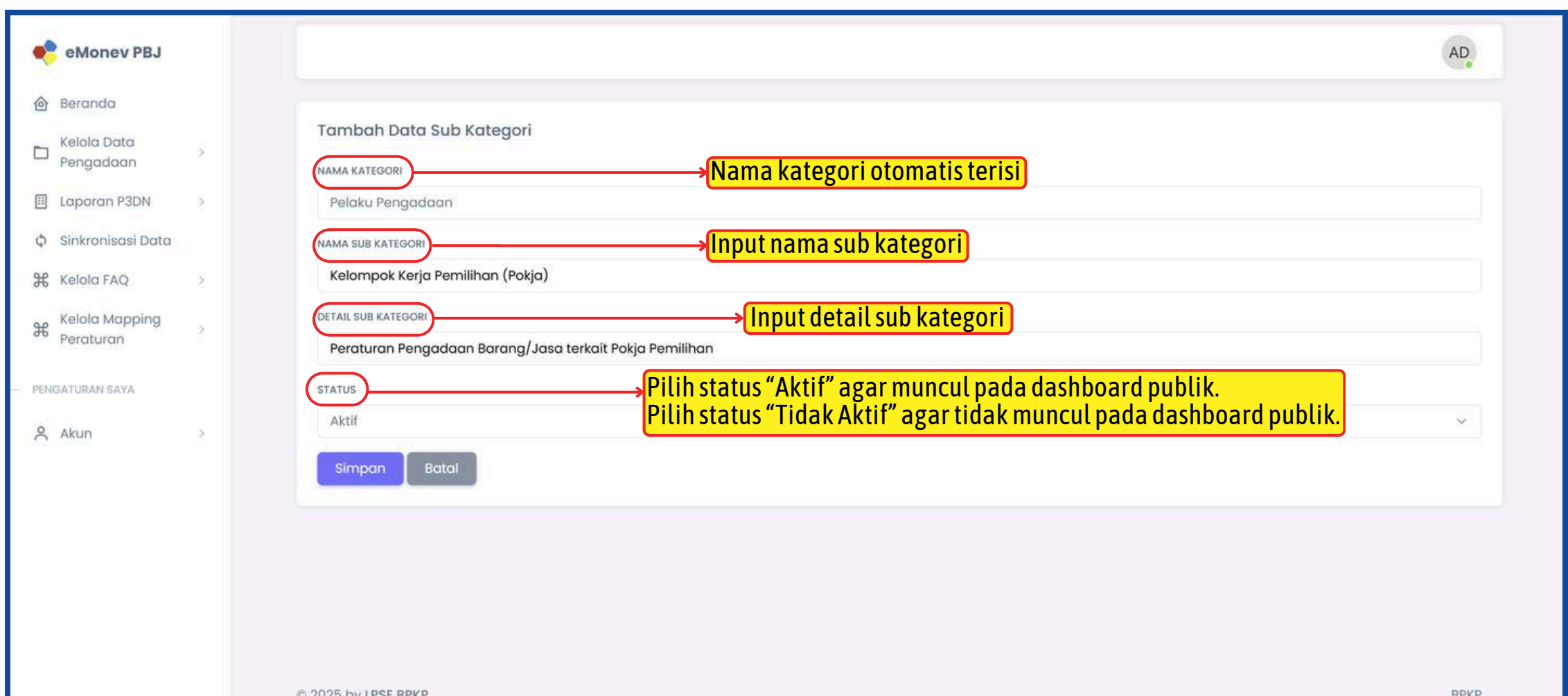
NAMA KATEGORI: Pelaku Pengadaan
 DETAIL KATEGORI: Menu Mapping Peraturan untuk para pelaku pengadaan
 STATUS: Aktif
 CREATED AT: 2025-10-04 09:54:22
 UPDATED AT: 2025-10-04 09:54:22

Data Sub Kategori Pelaku Pengadaan

Tampilkan 10 data

NO	NAMA SUB KATEGORI	DETAIL SUB KATEGORI	CREATED AT	STATUS	AKSI
1	Pejabat Pembuat Komitmen	Peraturan Pengadaan Barang/Jasa terkait Pejabat Pembuat Komitmen	04-10-2025	AKTIF	
2	Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja)	Peraturan Pengadaan Barang/Jasa terkait Pokja Pemilihan	05-10-2025	AKTIF	

Tambah



Tambah Data Sub Kategori

NAMA KATEGORI: Pelaku Pengadaan
 NAMA SUB KATEGORI: Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja)
 DETAIL SUB KATEGORI: Peraturan Pengadaan Barang/Jasa terkait Pokja Pemilihan
 STATUS: Aktif

Simpan Batalkan

Nama kategori otomatis terisi

Input nama sub kategori

Input detail sub kategori

Pilih status “Aktif” agar muncul pada dashboard publik.
 Pilih status “Tidak Aktif” agar tidak muncul pada dashboard publik.

UKPBJ - MAPPING PERATURAN

Edit Kategori Mapping

Pada sub menu Kategori Mapping, Admin dapat mengubah data kategori dengan klik fitur “Edit” lalu akan muncul halaman Edit Data Kategori Mapping. Isi detail kategori Mapping kemudian klik “Perbarui”.

Sub Menu
“Kategori
Mapping”



NO	NAMA KATEGORI	DETAIL KATEGORI	STATUS	AKSI
1	Pelaku Pengadaan	Menu Mapping Peraturan untuk para pelaku pengadaan	AKTIF	
2	Metode Pengadaan	Memuat peraturan terkait metode pengadaan barang/jasa.	AKTIF	
3	Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Memuat peraturan terkait Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	AKTIF	

NAMA KATEGORI → Edit nama kategori

DETAIL KATEGORI → Edit detail kategori

STATUS → Pilih status “Aktif” agar muncul pada dashboard publik.
Pilih status “Tidak Aktif” agar tidak muncul pada dashboard publik.

Buttons: Perbarui, Batal










UKPBJ - MAPPING PERATURAN

Hapus Kategori Mapping Peraturan

Pada sub menu Kategori Mapping, Admin dapat menghapus data kategori dengan klik fitur "Delete" lalu akan muncul Peringatan. Klik "Iya, saya yakin!" untuk melanjutkan penghapusan data atau klik "Batalkan" untuk membatalkan penghapusan data.

Sub Menu
"Kategori
Mapping"



NO	NAMA KATEGORI	DETAIL KATEGORI	STATUS	AKSI
1	Pelaku Pengadaan	Menu Mapping Peraturan untuk para pelaku pengadaan	AKTIF	  
2	Metode Pengadaan	Memuat peraturan terkait metode pengadaan barang/jasa.	AKTIF	  
3	Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Memuat peraturan terkait Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	AKTIF	  

Delete

Peringatan

Apakah Anda yakin?

Iya, saya yakin! Batalkan

UKPBJ - MAPPING PERATURAN

Input Mapping Peraturan

Pada sub menu Daftar Mapping, Admin dapat menambahkan data Mapping baru dengan klik “Tambah Data Mapping” lalu akan muncul halaman Tambah Data Mapping. Isi detail Data Mapping kemudian klik “Simpan”.

Sub Menu
“Daftar
Mapping”



Tambah

NO	KATEGORI	SUB KATEGORI	JUDUL MAPPING	STATUS	AKSI
1	Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	AKTIF	[View] [Edit] [Delete]
2	Pelaku Pengadaan	Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA dan KPA)	Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (PA dan KPA)	AKTIF	[View] [Edit] [Delete]
3	Pelaku Pengadaan	Pejabat Pembuat Komitmen	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	AKTIF	[View] [Edit] [Delete]
4	Metode Pengadaan	Tender	Mapping Metode Pengadaan	AKTIF	[View] [Edit] [Delete]
5	Pelaku Pengadaan	Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja)	Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja)	AKTIF	[View] [Edit] [Delete]

KATEGORI → Pilih kategori FAQ

SUB KATEGORI → Pilih sub kategori FAQ

JUDUL → Input judul

DESKRIPSI → Input deskripsi

LINK SPREADSHEET → Input link spreadsheet

STATUS → Pilih status “Aktif” agar muncul pada dashboard publik. Pilih status “Tidak Aktif” agar tidak muncul pada dashboard publik.

Gambar Infografis → Input gambar infografis



SELESAI